

PROBLEMATIKA PADA PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN ISLAM SERTA UPAYA PENCEGAHAN MELALUI KEBIJAKAN

Mohammad Nurul Huda
STAI Luqman Al Hakim Surabaya
irule.huda@gmail.com

Slamet
STAI Luqman al Hakim Surabaya
slamtkadireja@gmail.com

ABSTRACT

Pendidikan di Indonesia memegang peran krusial dalam pembentukan individu berpengetahuan, bermoral, dan kompetitif. Namun, berbagai problematika melingkupi sistem pendidikan, baik dalam pendidikan umum maupun Islam. Pendidikan umum dihadapkan pada tantangan seperti kesenjangan akses, rendahnya kualitas guru, kurikulum yang kurang relevan, dan keterbatasan teknologi. Hasil survei PISA 2018 menempatkan kemampuan siswa Indonesia dalam membaca, matematika, dan sains di bawah rata-rata global. Demikian pula, ketimpangan akses pendidikan masih terjadi, terutama di daerah terpencil seperti Papua.

Pendidikan Islam menghadapi tantangan spesifik terkait kualitas madrasah dan pesantren yang seringkali tertinggal dalam hal fasilitas, kurikulum, dan akses teknologi. Kurikulum yang cenderung berfokus pada ilmu agama tradisional kurang mendukung kebutuhan globalisasi yang menuntut integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Selain itu, rendahnya kesejahteraan dan kualitas guru di lembaga pendidikan Islam memperburuk problem ini. Sebagian besar guru belum memiliki kompetensi pedagogik yang memadai, ditambah minimnya pelatihan profesional.

Penelitian ini menyoroti perlunya reformasi pendidikan secara komprehensif, termasuk pembaruan kurikulum yang adaptif, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, dan peningkatan akses terhadap teknologi pendidikan. Pendidikan Islam dihadapkan pada kebutuhan untuk mempertahankan identitasnya sembari beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Dalam era digital, literasi teknologi menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan daya saing lulusan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa banyak lembaga pendidikan Islam belum mampu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Reformasi kebijakan yang berbasis data dan inovasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di semua lini, baik umum maupun Islam.

Tulisan ini merupakan jenis riset kepustakaan (*library research*) atau juga disebut studi pustaka, karena penulis mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat dan mengolah dari berbagai sumber, sumber data utama adalah dari buku, hasil penelitian dan jurnal. Tulisan ini diharapkan bisa memberikan manfaat tentang

problematika pada pendidikan dan pendidikan islam serta upaya pencegahan melalui kebijakan.

Kata kunci: Pendidikan Indonesia, pendidikan Islam, kesenjangan akses, kurikulum adaptif, reformasi pendidikan.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan manusia, masyarakat, dan bangsa. Di Indonesia, pendidikan berperan penting dalam membentuk individu yang berpengetahuan, bermoral, dan berdaya saing. Namun, problematika yang melingkupi sistem pendidikan di Indonesia, baik pendidikan umum maupun pendidikan Islam, sangat kompleks. Berbagai studi dan laporan internasional menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada posisi yang mengkhawatirkan dalam berbagai indikator pendidikan. Misalnya, laporan Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 menunjukkan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam membaca, matematika, dan sains masih berada di bawah rata-rata internasional, mencerminkan kualitas pendidikan yang masih jauh dari harapan¹

Sementara itu, pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional juga menghadapi tantangan tersendiri. Madrasah dan pesantren, yang memainkan peran penting dalam pendidikan Islam, seringkali terkendala dalam hal akses terhadap sumber daya dan teknologi, sehingga kualitas pembelajaran di lembaga-lembaga tersebut masih tertinggal dibandingkan dengan pendidikan umum. Selain itu, relevansi kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan Islam juga menjadi perhatian utama. Banyak kurikulum yang masih berfokus pada ilmu-ilmu agama, sementara tuntutan globalisasi menuntut integrasi yang lebih seimbang antara ilmu agama dan pengetahuan umum.²

¹ OECD. (2019). *PISA 2018 Results*. Paris: OECD Publishing.

² Hasan, N. (2012). *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi*. Jurnal Pendidikan Islam, 28(2), 89-110

Tantangan pendidikan di Indonesia tidak hanya terbatas pada aspek akses dan kualitas, tetapi juga terkait dengan relevansi kurikulum dan profesionalisme tenaga pendidik. Studi oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa banyak sekolah di daerah terpencil masih menghadapi kekurangan guru yang berkualitas, minimnya fasilitas, dan kurangnya pelatihan yang memadai bagi guru. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya capaian belajar siswa, terutama di daerah-daerah dengan akses pendidikan yang terbatas.³

Di sisi lain, pendidikan Islam, yang berakar pada tradisi keagamaan dan pendidikan pesantren, menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, selama ini dikenal dengan metode pembelajarannya yang tradisional, yang menekankan pada hafalan dan pemahaman kitab kuning. Namun, di era modern ini, banyak pihak yang menyoroti kurangnya adaptasi pesantren terhadap perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan modern. Misalnya, hasil penelitian oleh Yusuf menemukan bahwa banyak pesantren yang belum mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran, yang membuat lulusan pesantren seringkali tertinggal dalam hal keterampilan praktis yang dibutuhkan di dunia kerja.⁴

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Zaenuddin juga menunjukkan bahwa madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam formal sering kali menghadapi tantangan dalam menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.⁵ Dalam banyak kasus, kurikulum di madrasah cenderung terlalu fokus pada ilmu agama dan kurang memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan umum, teknologi, dan

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Rapor Pendidikan Indonesia 2020*. Jakarta: Kemendikbud

⁴ Yusuf, M. (2017). *Manajemen Pendidikan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish

⁵ Zaenuddin, A. (2019). *Tantangan Pendidikan Islam di Era Digital*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 27(1), 56-74.

keterampilan praktis. Kurangnya penguatan literasi digital di kalangan siswa madrasah juga menjadi tantangan utama dalam menghadapi era digitalisasi yang kian berkembang.

Lebih lanjut, Hasan menyebutkan bahwa salah satu problem utama dalam pendidikan Islam adalah kurangnya perhatian terhadap pembaruan kurikulum yang dapat mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum.⁶ Pendidikan Islam seringkali masih dianggap bersifat eksklusif dan tertutup dari arus modernisasi, sehingga memerlukan reformasi yang mendasar untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

B. PEMBAHASAN

1. Problematika pada Pendidikan di Indonesia

Pendidikan di Indonesia mengalami sejumlah problem yang kompleks dan multidimensi. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, berbagai masalah masih muncul dalam pelaksanaannya. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan akses, rendahnya kualitas guru, kurikulum yang tidak adaptif, serta kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi. Masalah ini memengaruhi kualitas hasil pendidikan, yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan kompetitif tenaga kerja Indonesia di pasar global. Berikut adalah uraian rinci mengenai berbagai problem dalam pendidikan Indonesia yang disertai dengan data dan hasil penelitian terkait.

a. Kesenjangan Akses Pendidikan

Kesenjangan akses pendidikan di Indonesia merupakan salah satu masalah utama yang menghambat pemerataan pendidikan. Masih terdapat ketimpangan yang signifikan antara akses pendidikan di wilayah perkotaan dan pedesaan, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Papua, Nusa Tenggara, dan Sumatera. Berdasarkan

⁶ Hasan, N. (2012). *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi*. Jurnal Pendidikan Islam, 28(2), 89-110

data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka partisipasi sekolah (APS) untuk jenjang pendidikan menengah masih rendah di beberapa provinsi luar Jawa. Sebagai contoh, APS di Papua untuk tingkat SMA masih di bawah 60%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan provinsi di Pulau Jawa yang rata-rata mencapai di atas 80%.⁷

Penelitian oleh Amrullah menunjukkan bahwa ketidakmerataan fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah, jumlah guru, dan akses terhadap bahan ajar menjadi penyebab utama kesenjangan akses ini.⁸ Di daerah-daerah terpencil, banyak sekolah yang tidak memiliki fasilitas dasar seperti ruang kelas yang layak, perpustakaan, dan laboratorium. Selain itu, transportasi yang sulit dan mahal juga menjadi kendala bagi siswa untuk mencapai sekolah, sehingga banyak anak putus sekolah lebih awal.

b. Rendahnya Kualitas Guru

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas pendidikan. Sayangnya, di Indonesia, kualitas guru masih menjadi salah satu problem yang signifikan. Menurut laporan dari World Bank, sebagian besar guru di Indonesia belum memenuhi standar kualifikasi yang diperlukan untuk mengajar secara efektif. Banyak guru, terutama di daerah pedesaan, yang tidak memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan bidang yang mereka ajarkan. Selain itu, banyak guru yang tidak mendapatkan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kompetensi mereka.⁹

Penelitian dari Rahmawati juga mengungkapkan bahwa rendahnya kualitas guru ini disebabkan oleh kurangnya program pengembangan profesional bagi guru.¹⁰

Program pelatihan guru yang tersedia seringkali tidak relevan dengan kebutuhan lapangan atau tidak sesuai dengan perkembangan pedagogi modern. Selain

⁷ Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Statistik Pendidikan di Indonesia 2020*. Jakarta: BPS.

⁸ Amrullah, R. (2020). *Kesenjangan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil: Kasus Papua*. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 28(1), 15-28

⁹ World Bank. (2020). *Indonesia: Education Reform in the Wake of COVID-19*. Washington, DC: World Bank

¹⁰ Rahmawati, S. (2018). *Pengembangan Profesional Guru di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan*, 29(3), 22-34

itu, sistem rekrutmen guru yang kurang selektif juga turut memperburuk masalah ini. Banyak guru yang diangkat tanpa melalui proses seleksi yang ketat, sehingga kualitas pengajaran di lapangan menjadi tidak optimal.

c. Kurikulum yang Tidak Adaptif

Salah satu masalah utama lainnya dalam pendidikan di Indonesia adalah kurikulum yang dianggap tidak fleksibel dan kurang adaptif terhadap perubahan zaman. Kurikulum yang diterapkan sering kali dianggap terlalu padat, tidak relevan dengan kebutuhan siswa, dan tidak memberi ruang yang cukup bagi kreativitas serta pengembangan soft skills. Misalnya, kurikulum masih terlalu fokus pada pencapaian akademik yang terukur melalui ujian, sementara keterampilan non-akademik, seperti keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kritis, kurang mendapat perhatian.

Penelitian dari Zulkifli menemukan bahwa sebagian besar siswa merasa tertekan dengan banyaknya materi yang harus dipelajari dan sulit untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Kurikulum yang terlalu berorientasi pada hasil ujian juga berdampak negatif pada proses pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student-centered learning*), di mana guru seringkali lebih fokus mengajar untuk mencapai target kurikulum daripada memahami kebutuhan dan potensi individu siswa.¹¹

Reformasi kurikulum telah dilakukan melalui penerapan Kurikulum 2013 (K13), namun pelaksanaannya di lapangan masih belum optimal. Banyak sekolah dan guru yang belum siap mengimplementasikan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi yang diamanatkan dalam kurikulum tersebut, terutama di daerah-daerah yang minim fasilitas dan dukungan pelatihan. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan antara sekolah-sekolah di perkotaan yang lebih maju dengan sekolah-sekolah di pedesaan.¹²

¹¹ Zulkifli, M. (2019). *Kurikulum dan Relevansi Pendidikan di Indonesia*. Jurnal Pendidikan, 28(2), 11-23

¹²Zaenuddin, A. (2019). *Tantangan Kurikulum 2013 di Sekolah-Sekolah Pedesaan*. Jurnal Pendidikan Nasional, 23(4), 89-105

d. Rendahnya Pemanfaatan Teknologi dalam Pendidikan

Di era digital seperti saat ini, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan menjadi hal yang sangat penting. Namun, di Indonesia, banyak sekolah yang masih belum memiliki infrastruktur teknologi yang memadai. Penelitian oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa sekitar 30% sekolah di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil, belum memiliki akses internet.¹³ Kondisi ini menghambat upaya pemerintah untuk menerapkan pembelajaran berbasis teknologi, termasuk penerapan e-learning dan sistem informasi sekolah.

Selain masalah infrastruktur, rendahnya literasi digital di kalangan guru dan siswa juga menjadi penghambat utama dalam pemanfaatan teknologi di sekolah. Banyak guru yang belum menguasai teknologi dengan baik, sehingga sulit untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Penelitian dari Raharjo menyatakan bahwa sebagian besar guru masih menggunakan metode pengajaran tradisional, seperti ceramah, yang kurang efektif dalam memanfaatkan media teknologi.¹⁴

Krisis ini semakin terlihat jelas selama pandemi COVID-19, di mana pembelajaran daring menjadi satu-satunya pilihan untuk melanjutkan pendidikan. Bagi sekolah-sekolah di perkotaan dengan infrastruktur teknologi yang memadai, adaptasi ini dapat dilakukan dengan relatif cepat. Namun, bagi sekolah-sekolah di pedesaan yang minim akses terhadap teknologi, pembelajaran daring menjadi tantangan besar. Banyak siswa di daerah terpencil yang terpaksa putus sekolah karena tidak memiliki perangkat yang memadai, seperti komputer atau smartphone, dan tidak memiliki akses internet yang stabil.¹⁵

e. Ketidakmerataan Anggaran Pendidikan

¹³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Laporan Pendidikan Indonesia 2020*. Jakarta: Kemendikbud

¹⁴ Raharjo, T. (2019). *Literasi Digital di Kalangan Guru Sekolah Menengah*. Jurnal Teknologi Pendidikan, 33(2),99-110

¹⁵ World Bank. (2020). *Indonesia: Education Reform in the Wake of COVID-19*. Washington, DC: World Bank

Meskipun pemerintah telah menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, alokasi dana pendidikan di Indonesia masih menghadapi masalah distribusi yang tidak merata. Banyak sekolah di daerah-daerah terpencil yang menerima alokasi dana yang sangat terbatas, sehingga tidak dapat menyediakan fasilitas pendidikan yang layak. Selain itu, manajemen keuangan yang kurang transparan dan akuntabel di beberapa sekolah juga menjadi penyebab utama terhambatnya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.¹⁶

Penelitian dari Ismail menyebutkan bahwa distribusi anggaran pendidikan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Sekolah-sekolah di kota besar mendapatkan alokasi yang lebih besar untuk peningkatan fasilitas dan pengembangan SDM, sementara sekolah-sekolah di pedesaan dan daerah terpencil seringkali hanya mendapatkan dana yang cukup untuk operasional dasar.¹⁷ Hal ini menyebabkan kesenjangan kualitas antara sekolah-sekolah di perkotaan dan pedesaan semakin melebar.

2. Permasalahan Pendidikan Islam di Indonesia

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan moralitas Islam. Sejak dahulu, pendidikan Islam telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional, dengan berbagai lembaga seperti pesantren, madrasah, dan sekolah Islam lainnya yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Namun, meskipun peran pendidikan Islam sangat vital, ia menghadapi sejumlah tantangan yang cukup serius, baik dari aspek internal maupun eksternal. Permasalahan yang dihadapi oleh pendidikan Islam di Indonesia tidak hanya terkait dengan isu kurikulum, kualitas guru, dan fasilitas, tetapi juga masalah relevansi pendidikan dengan kebutuhan global serta tantangan modernisasi dan digitalisasi. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai

¹⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Laporan Pendidikan Indonesia 2020*. Jakarta:Kemendikbud

¹⁷ Ismail, F. (2018). *Distribusi Anggaran Pendidikan di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Jurnal Manajemen Pendidikan, 35(2), 45-60

berbagai permasalahan yang dihadapi pendidikan Islam di Indonesia, lengkap dengan referensi akademik.

a. Kesenjangan Kualitas Antara Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum

Salah satu permasalahan utama dalam pendidikan Islam adalah kesenjangan kualitas antara lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah dan pesantren, dengan sekolah umum. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan Islam sering kali berada di bawah standar yang ditetapkan oleh pemerintah dibandingkan dengan sekolah umum. Sebuah studi oleh Hasan menyatakan bahwa perbedaan dalam hal sumber daya manusia (guru), fasilitas, dan kurikulum menjadi faktor utama yang menyebabkan kesenjangan ini.¹⁸ Banyak madrasah dan pesantren yang masih mengandalkan metode pembelajaran tradisional dan kurang memiliki fasilitas yang memadai, seperti laboratorium sains dan teknologi, perpustakaan yang lengkap, atau akses terhadap teknologi digital.

Di madrasah, yang merupakan lembaga formal pendidikan Islam, kurikulum yang diterapkan seringkali lebih fokus pada mata pelajaran agama dibandingkan mata Pelajaran umum. Meskipun pendidikan agama penting, ketidakseimbangan ini menyebabkan lulusan madrasah cenderung kurang kompetitif dalam dunia kerja, terutama di sektor-sektor yang menuntut penguasaan teknologi dan pengetahuan umum yang kuat. Hal ini dikonfirmasi oleh penelitian yang dilakukan oleh Azra, yang menyebutkan bahwa tantangan terbesar pendidikan Islam adalah bagaimana menyeimbangkan antara pendidikan agama dan ilmu pengetahuan umum.¹⁹

b. Kurikulum yang Kurang Relevan dengan Tuntutan Zaman

Pendidikan Islam seringkali dianggap kurang adaptif terhadap perubahan zaman, terutama dalam menghadapi tuntutan globalisasi dan perkembangan ilmu

¹⁸ Hasan, H. (2012). *Kualitas Pendidikan Islam dan Sekolah Umum di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Nasional, 10 (3) 15-30

¹⁹ Azra, A. (2017). *Pendidikan Islam di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Jurnal Studi Islam, 15(1), 13-25

pengetahuan dan teknologi. Kurikulum di banyak lembaga pendidikan Islam, terutama di pesantren, masih sangat tradisional dan berfokus pada ilmu agama klasik seperti fiqh, tafsir, hadits, dan ilmu- ilmu alat seperti bahasa Arab. Meskipun mata pelajaran ini sangat penting dalam pembentukan keilmuan Islam, kurikulum yang tidak fleksibel ini membuat lulusan pendidikan Islam kurang siap bersaing di dunia modern yang sangat menekankan penguasaan teknologi, sains, dan keterampilan praktis lainnya.²⁰

Di sisi lain, meskipun madrasah telah mulai mengadopsi Kurikulum 2013 yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa di bidang sains dan teknologi, implementasinya masih menemui banyak kendala di lapangan. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Zaenuddin menemukan bahwa banyak madrasah, terutama di daerah pedesaan, kesulitan mengintegrasikan kurikulum baru ini karena kurangnya dukungan sumber daya, baik dalam bentuk fasilitas laboratorium maupun pelatihan guru.²¹ Akibatnya, meskipun secara formal kurikulum telah berubah, proses pembelajaran di kelas seringkali masih sangat tradisional dan tidak mencerminkan tuntutan zaman.

c. Kualitas dan Kesejahteraan Guru

Salah satu masalah terbesar yang dihadapi pendidikan Islam adalah rendahnya kualitas dan kesejahteraan guru. Guru adalah faktor kunci dalam menciptakan pendidikan berkualitas, namun di banyak lembaga pendidikan Islam, terutama di madrasah dan pesantren, kualitas guru masih belum memenuhi standar yang ideal. Sebagian besar guru di madrasah tidak memiliki kualifikasi formal yang memadai dan tidak mendapatkan pelatihan yang cukup untuk meningkatkan kompetensi mereka, baik dalam pengajaran mata pelajaran agama maupun mata pelajaran umum.²²

²⁰ Lukman, L. (2019). *Problematika Kurikulum di Madrasah dan Pesantren*. Jurnal Kurikulum Pendidikan Islam, 23(2), 66-78

²¹ Zaenuddin, A. (2019). *Tantangan Pendidikan Islam di Era Digital*. Jurnal Pendidikan Islam, 27(1), 56-74

²² Suryadi, S. (2018). *Kesejahteraan Guru di Madrasah dan Dampaknya terhadap Kualitas Pendidikan*. Jurnal Pendidikan Islam, 40(2), 53-65.

Kesejahteraan guru juga menjadi masalah serius. Banyak guru madrasah, terutama yang berstatus honorer, menerima gaji yang jauh di bawah standar yang layak. Kondisi ini menyebabkan motivasi dan profesionalisme guru menjadi rendah. Menurut survei yang dilakukan oleh Yusuf, banyak guru di madrasah yang merasa frustrasi karena tidak ada peningkatan karir yang jelas, sementara tuntutan pengajaran semakin meningkat. Kesejahteraan yang rendah ini juga memengaruhi kemampuan mereka untuk mengakses pelatihan dan pengembangan diri, yang pada akhirnya berimbas pada kualitas pembelajaran yang mereka berikan kepada siswa.²³

d. Minimnya Fasilitas dan Infrastruktur

Fasilitas dan infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Namun, banyak madrasah dan pesantren di Indonesia yang masih kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang layak, perpustakaan, laboratorium, dan akses terhadap teknologi informasi. Sebuah penelitian oleh Bappenas mengungkapkan bahwa sebagian besar madrasah, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil, tidak memiliki laboratorium sains yang memadai, yang menyebabkan siswa tidak mendapatkan kesempatan untuk mempraktikkan teori-teori yang mereka pelajari di kelas.²⁴

Selain itu, banyak pesantren yang belum memiliki infrastruktur modern yang memadai. Meskipun pesantren dikenal dengan pendidikan yang berbasis agama yang kuat, namun dalam konteks pendidikan umum, fasilitas di banyak pesantren sangat terbatas. Tidak adanya fasilitas olahraga, laboratorium, atau bahkan akses internet yang stabil menjadi kendala utama dalam mengembangkan keterampilan siswa di luar

²³ Yusuf, Y. (2017). *Profesionalisme dan Kesejahteraan Guru Madrasah*. Jurnal Manajemen Pendidikan, 38(3),47-62

²⁴ Bappenas. (2019). *Laporan Pendidikan Indonesia 2019: Fokus pada Pendidikan Islam*. Jakarta: Bappenas

pendidikan agama.²⁵ Kondisi ini tentu saja menghambat perkembangan intelektual dan keterampilan praktis siswa di pesantren.

e. Rendahnya Penguasaan Teknologi

Di era digital ini, penguasaan teknologi menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan daya saing lulusan di dunia kerja. Namun, di banyak lembaga pendidikan Islam, baik madrasah maupun pesantren, penguasaan teknologi masih sangat rendah. Kurangnya literasi digital dikalangan siswa dan guru menjadi masalah serius yang perlu segera diatasi. Menurut Rahmat sebagian besar siswa di madrasah masih sangat terbatas dalam akses dan penggunaan teknologi informasi, baik untuk keperluan pembelajaran maupun untuk pengembangan diri.²⁶

Selain itu, banyak pesantren yang masih belum mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran tradisional yang mengandalkan teks-teks klasik dan hafalan masih dominan, tanpa adanya upaya serius untuk menggabungkannya dengan teknologi digital yang dapat memperkaya proses pembelajaran. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi, ditemukan bahwa sebagian besar pesantren di Indonesia masih kesulitan mengakses internet, dan hanya sedikit yang menggunakan perangkat digital seperti komputer atau proyektor di ruang kelas. Kondisi ini semakin memperburuk ketertinggalan lulusan pesantren dalam hal literasi digital dan keterampilan praktis lainnya.²⁷

f. Tantangan dalam Mengintegrasikan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum

²⁵ Amiruddin, A. (2020). *Modernisasi Pesantren dan Tantangan Infrastruktur di Era Digital*. Jurnal PendidikanIslam, 45(2), 25-40

²⁶ Rahmat, R. (2019). *Literasi Digital di Kalangan Siswa Madrasah*. Jurnal Teknologi Pendidikan Islam, 33(1), 91-105

²⁷ Wahyudi, W. (2020). *Teknologi dalam Pendidikan Pesantren: Peluang dan Tantangan*. Jurnal PendidikanIslam Modern, 12(4), 88-101

Permasalahan integrasi antara pendidikan Islam dan pendidikan umum menjadi salah satu isu besar yang dihadapi oleh madrasah dan pesantren. Seringkali, pendidikan Islam terlalu fokus pada aspek-aspek teologis dan ritual keagamaan, sementara penguasaan ilmu pengetahuan umum, sains, dan teknologi kurang diperhatikan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lukman, banyak madrasah dan pesantren yang masih mengalami kesulitan dalam menemukan keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum.²⁸

Salah satu tantangan utama dalam integrasi ini adalah kurangnya pemahaman di kalangan pengelola lembaga pendidikan Islam mengenai pentingnya ilmu pengetahuan umum sebagai bagian dari pendidikan Islam yang holistik. Dalam Islam, ilmu pengetahuan tidak dipisahkan antara yang “sakral” dan “sekuler”; semua ilmu memiliki nilai jika digunakan untuk kebaikan. Namun, pada praktiknya, masih banyak lembaga pendidikan Islam yang memisahkan kedua bidang tersebut, sehingga lulusan pendidikan Islam sering kali kurang memiliki keterampilan yang relevan untuk dunia kerja modern.²⁹

3. Langkah Konkret Pencegahan Problematika Pendidikan Melalui Kebijakan

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, namun dalam realitasnya, banyak permasalahan yang dihadapi oleh sektor pendidikan. Problematika ini meliputi kesenjangan kualitas pendidikan, rendahnya kualitas guru, ketidakadilan akses pendidikan, dan keterbatasan sarana prasarana pendidikan. Untuk mencegah dan mengatasi problematika tersebut, pemerintah, bersama dengan pihak terkait, perlu merumuskan kebijakan yang konkret dan terukur. Berikut adalah uraian detail mengenai langkah-langkah konkret yang

²⁸ Lukman, L. (2019). *Problematika Kurikulum di Madrasah dan Pesantren*. Jurnal Kurikulum Pendidikan Islam, 23(2), 66-78

²⁹ Azra, A. (2017). *Pendidikan Islam di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Jurnal Studi Islam, 15(1), 13-25

dapat diambil untuk mencegah dan mengatasi masalah pendidikan melalui kebijakan yang tepat, lengkap dengan referensi akademik.

a. Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Guru

Guru merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan. Guru yang berkualitas dan Sertifikasi Guru di Indonesia: Sebuah Kebijakan untuk Meningkatkan Profesionalisme dan Kualitas Pendidikan.

1) Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru merupakan salah satu kebijakan penting yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan kualitas guru. Sejak diluncurkan pada tahun 2005 melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, program sertifikasi ini memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan standar pendidikan di Indonesia. Dalam ulasan ini, akan dibahas secara rinci mengenai latar belakang, tujuan, mekanisme pelaksanaan, tantangan, serta dampak dari kebijakan ini dalam dunia pendidikan.³⁰

Pada awalnya, kebijakan sertifikasi guru muncul sebagai tanggapan terhadap rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, yang ditunjukkan oleh hasil uji kompetensi siswa dan guru, serta rendahnya tingkat kesejahteraan guru. Sebelum sertifikasi diterapkan, banyak guru yang belum memenuhi standar minimal kompetensi yang ditetapkan untuk profesi ini. Kondisi ini berdampak pada rendahnya mutu pengajaran di sekolah-sekolah, terutama di daerah terpencil dan tertinggal.³¹

Kebijakan sertifikasi guru bertujuan untuk:

a) Meningkatkan Profesionalisme Guru.

³⁰ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

³¹ Hasan, H. (2012). Sertifikasi Guru Madrasah dan Kualitas Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(4), 22-35

Guru yang bersertifikat diharapkan memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang lebih baik.

b) Meningkatkan Kesejahteraan Guru.

Guru yang telah lulus sertifikasi mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok, yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja mereka.

c) Menjamin Kualitas Pembelajaran.

Sertifikasi diharapkan menjadi instrumen untuk memastikan bahwa guru yang mengajar di sekolah-sekolah Indonesia memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk memberikan pembelajaran yang bermutu.

2) Pelatihan dan Pengembangan Berkelanjutan (CPD)

Pelatihan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) merupakan salah satu kebijakan utama pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi guru di seluruh jenjang pendidikan. Seiring dengan tantangan global dan tuntutan pendidikan abad ke-21, kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa guru tidak hanya mendapatkan pelatihan satu kali, tetapi terus-menerus mengikuti pelatihan guna memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka sepanjang karier. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga relevansi keterampilan guru dengan perkembangan pendidikan dan teknologi yang terus berkembang.³²

Pendidikan modern membutuhkan guru yang mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan metodologi pengajaran. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, fasilitas, atau siswa, tetapi juga oleh kapasitas guru untuk memberikan pengajaran yang inovatif dan relevan.³³

³² Sahlberg, P. (2011). *Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland?*. Teachers College Press

³³ Sudarman, R. (2020). *Penggunaan Teknologi dalam Pengajaran di Sekolah Menengah*. Jurnal Teknologi Pendidikan, 33(2), 57-75

Oleh karena itu, guru harus senantiasa meningkatkan keterampilan mereka melalui berbagai program pelatihan yang berkelanjutan.

b. Pengembangan Kurikulum yang Adaptif dan Relevan

Kurikulum merupakan salah satu elemen paling mendasar dalam sistem pendidikan, yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Perkembangan zaman, perubahan sosial, teknologi, serta kebutuhan dunia kerja yang dinamis telah menuntut perubahan dalam penyusunan kurikulum agar lebih adaptif terhadap berbagai tantangan tersebut.

Kurikulum di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan besar sejak awal kemerdekaan. Beberapa di antaranya adalah kurikulum 1947, 1968, 1975, 1984, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006, dan Kurikulum 2013 (K13). Setiap perubahan kurikulum mencerminkan perubahan kebutuhan masyarakat, perkembangan global, serta dinamika sosial politik.³⁴

Kebutuhan akan kurikulum yang lebih adaptif muncul dari beberapa faktor utama:

a. Perkembangan Teknologi dan Informasi

Kemajuan teknologi yang cepat, terutama dalam era digital, menuntut adanya pengajaran yang mempersiapkan siswa untuk menjadi individu yang melek teknologi, mampu beradaptasi dengan lingkungan digital, dan memahami literasi data.

b. Perubahan Sosial dan Ekonomi

Dunia kerja telah mengalami perubahan besar dengan adanya revolusi industri 4.0, yang menuntut keterampilan berbeda seperti pemikiran kritis, kreativitas,

³⁴ World Bank. (2020). *Indonesia: Education Reform in the Wake of COVID-19*. Washington, DC: World Bank.

olaborasi, dan kemampuan beradaptasi. Kurikulum yang adaptif perlu disusun untuk menjawab tantangan ini.

c. Kebutuhan Pendidikan Berbasis Karakter

Selain aspek kognitif, ada kesadaran yang semakin meningkat tentang pentingnya pendidikan karakter yang menekankan nilai-nilai seperti integritas, empati, gotong royong, dan toleransi. Kurikulum yang adaptif harus mencerminkan keseimbangan antara kecerdasan kognitif dan emosional.

d. Globalisasi dan Kompetisi Internasional

Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mempersiapkan siswa di tingkat nasional, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk bersaing secara global. Oleh karena itu, kurikulum harus menyelaraskan standar pendidikan nasional dengan standar pendidikan global.³⁵

Pengembangan kurikulum adaptif di Indonesia salah satunya diwujudkan melalui implementasi Kurikulum Merdeka, yang diperkenalkan pada tahun 2020 sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar. Kurikulum ini bertujuan untuk memberi kebebasan lebih besar kepada sekolah dan guru dalam merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa. Kurikulum Merdeka juga mengusung konsep “pemulihan pembelajaran” pasca-pandemi COVID-19, yang menyadari adanya kehilangan pembelajaran selama periode pembelajaran jarak jauh. Kebijakan pengembangan kurikulum yang adaptif merupakan langkah penting yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menghadapi tantangan pendidikan abad ke-21. Dengan menekankan fleksibilitas, relevansi, dan integrasi teknologi, kurikulum adaptif berusaha untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia yang semakin kompleks dan dinamis. Meskipun masih ada tantangan dalam pelaksanaannya, khususnya terkait dengan kesiapan guru dan keterbatasan sumber daya, kebijakan ini

³⁵ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

membawa harapan besar untuk masa depan pendidikan yang lebih inklusif, relevan, dan berkualitas.

c. Kebijakan Akses Pendidikan yang Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan pendidikan yang bertujuan memberikan akses pendidikan yang setara kepada semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, kemampuan fisik, atau kondisi khusus lainnya. Di Indonesia, konsep Pendidikan inklusif telah menjadi bagian penting dari kebijakan pendidikan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan *education for all* atau pendidikan untuk semua, sebagaimana termaktub dalam berbagai dokumen kebijakan, undang-undang, serta kesepakatan internasional yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia.

Kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia berupaya memastikan bahwa setiap anak, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, dapat menikmati haknya atas pendidikan yang layak. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara rinci tentang kebijakan akses pendidikan inklusif di Indonesia, termasuk latar belakang, prinsip-prinsip, implementasi kebijakan, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap sistem pendidikan di Indonesia.

Pendidikan inklusif di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kerangka kerja global tentang hak atas pendidikan. Salah satu tonggak penting dalam pengakuan hak pendidikan inklusif di tingkat internasional adalah *Deklarasi Salamanca* pada tahun 1994, yang menegaskan hak semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus, untuk menerima pendidikan di sekolah reguler yang mendukung inklusivitas.

Indonesia, sebagai negara yang menandatangani Deklarasi Salamanca, telah berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip pendidikan inklusif ke dalam sistem pendidikan nasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga secara jelas menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi.

Meskipun tantangan dalam implementasinya cukup besar, pendidikan inklusif telah memberikan dampak yang positif bagi siswa dan masyarakat luas. Beberapa manfaat yang dapat diidentifikasi dari penerapan pendidikan inklusif adalah:

a. Meningkatkan Kesetaraan Pendidikan

Pendidikan inklusif membantu mengurangi kesenjangan pendidikan antara siswa dengan kebutuhan khusus dan siswa pada umumnya. Anak-anak dengan disabilitas yang sebelumnya tidak mendapatkan akses ke pendidikan formal kini memiliki kesempatan untuk belajar di sekolah reguler.

b. Pengembangan Karakter dan Nilai Sosial

Pendidikan inklusif tidak hanya menguntungkan anak-anak dengan kebutuhan khusus, tetapi juga siswa lainnya. Dengan belajar bersama dalam lingkungan yang inklusif, siswa belajar untuk saling menghormati, bekerja sama, dan menghargai perbedaan. Hal ini berkontribusi pada pengembangan nilai-nilai sosial yang kuat di kalangan siswa.

c. Peningkatan Kemandirian Siswa dengan Disabilitas

Pendidikan inklusif mendorong anak-anak dengan disabilitas untuk menjadi lebih mandiri dan mampu berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka. Dengan dukungan yang tepat, mereka dapat mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan akademik yang diperlukan untuk menjalani kehidupan secara mandiri.³⁶

C. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, jelas bahwa pendidikan Islam di Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius, baik dari segi kualitas, infrastruktur, maupun relevansi dengan tuntutan zaman. Kesenjangan kualitas antara pendidikan Islam dan pendidikan umum, kurikulum yang kurang adaptif, rendahnya kualitas dan kesejahteraan guru, minimnya fasilitas, rendahnya penguasaan teknologi, serta

³⁶ Purnomo, P. S., et al. (2016). "Implementasi Pendidikan Inklusif di Indonesia: Studi Kasus di Kota Yogyakarta." *Jurnal Pendidikan Inklusif.

tantangan dalam mengintegrasikan pendidikan agama dan ilmu pengetahuan umum, semuanya berkontribusi pada problematika pendidikan Islam di Indonesia.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, dibutuhkan reformasi yang komprehensif, mulai dari peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, pembaruan kurikulum yang lebih relevan dengan tuntutan global, hingga peningkatan infrastruktur dan akses terhadap teknologi di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Pemerintah dan pihak-pihak terkait harus bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan yang dapat memperkuat pendidikan Islam dan menjadikannya lebih kompetitif di era modern ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, A. (2020). Modernisasi Pesantren dan Tantangan Infrastruktur di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Islam*, 45(2), 25-40.
- Amrullah, R. (2020). Kesenjangan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil: Kasus Papua. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 28(1), 15-28.
- Azra, A. (2017). Kurikulum Pendidikan Islam dan Integrasi Sains dalam Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 12-25.
- Azra, A. (2017). Pendidikan Islam di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Studi Islam*, 15(1), 13-25.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Statistik Pendidikan di Indonesia 2020*. Jakarta: BPS.
- Bappenas. (2019). *Laporan Pendidikan Indonesia 2019: Fokus pada Pendidikan Islam*. Jakarta: Bappenas.
- Bappenas. (2019). *Laporan Pendidikan Indonesia 2019*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Rapor Pendidikan Indonesia 2020. Jakarta: Kemendikbud.

Hasan, H. (2012). Kualitas Pendidikan Islam dan Sekolah Umum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 10(3), 15-30.

Hasan, H. (2012). Sertifikasi Guru Madrasah dan Kualitas Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(4), 22-35.

Hasan, H. (2017). Sertifikasi Guru dan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(4), 22-35.

Hasan, N. (2012). Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 28(2), 89-110.

Hidayat, M. (2018). Program Beasiswa dan Pengaruhnya terhadap Partisipasi Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 21(1), 88-102.

Ismail, F. (2018). Distribusi Anggaran Pendidikan di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 35(2), 45-60.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Laporan Pendidikan Indonesia 2020. Jakarta: Kemendikbud. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Kurikulum Merdeka: Panduan Implementasi.

Lukman, L. (2019). Problematika Kurikulum di Madrasah dan Pesantren. *Jurnal Kurikulum Pendidikan Islam*, 23(2), 66-78.

Lukman, L. (2019). Relevansi Kurikulum Pendidikan Islam dengan Kebutuhan Abad. *Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2), 55-70.

Nasir, N. (2017). Pengembangan Profesionalisme Guru Madrasah di Malaysia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 22(1), 30-45.

OECD. (2019). *PISA 2018 Results*. Paris: OECD Publishing.

Permendikbud No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kebijakan Pendidikan.

Purnomo, P. S., et al. (2016). Implementasi Pendidikan Inklusif di Indonesia: Studi Kasus di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Inklusif*.

Rahmawati, S. (2018). Pengembangan Profesional Guru di Indonesia. *Jurnal Pendidikan*, 29(3), 22-34.

Rahmat, R. (2019). Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran di Madrasah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 21(1), 88-102.

Rahmat, R. (2019). Teknologi dalam Pembelajaran Madrasah: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Teknologi*, 14(1), 90-105.

Rahmat, R. (2019). Literasi Digital di Kalangan Siswa Madrasah. *Jurnal Teknologi Pendidikan Islam*, 33(1), 91-105.

Raharjo, T. (2019). Literasi Digital di Kalangan Guru Sekolah Menengah. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 33(2), 99-110.

Sahlberg, P. (2011). *Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland?* Teachers College Press.

Sudarman, R. (2020). Penggunaan Teknologi dalam Pengajaran di Sekolah Menengah. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 33(2), 57-75.

Susanto, A., et al. (2018). Persepsi Guru Tentang Implementasi Pendidikan Inklusif di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Khusus*.

Suryadi, S. (2018). Kesejahteraan Guru di Madrasah dan Dampaknya terhadap Kualitas Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 40(2), 53-65.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Wahyudi, W. (2020). Infrastruktur Teknologi di Pesantren: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 33(2), 57-75.

Wahyudi, W. (2020). Peningkatan Akses Internet di Sekolah-sekolah Pedalaman Indonesia. *Jurnal Pendidikan Teknologi*, 14(1), 90-105.

Wahyudi, W. (2020). Teknologi dalam Pendidikan Pesantren: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Pendidikan Islam Modern*, 12(4), 88-101.

World Bank. (2020). *Indonesia: Education Reform in the Wake of COVID-19*. Washington, DC: World Bank.

World Bank. (2020). "Education Reform in Indonesia: How Curriculum and Teacher Development Are Key to Success."

Yusuf, M. (2017). *Manajemen Pendidikan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Yusuf, Y. (2017). Kesejahteraan Guru di Pesantren dan Madrasah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(3), 47-65.

Yusuf, Y. (2017). Kesejahteraan Guru dan Dampaknya terhadap Kualitas Pengajaran. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(3), 47-65.

Yusuf, Y. (2017). Profesionalisme dan Kesejahteraan Guru Madrasah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 38(3), 47-62.

Zaenuddin, A. (2019). Tantangan Kurikulum 2013 di Sekolah-Sekolah Pedesaan. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 23(4), 89-105.

Zaenuddin, A. (2019). Tantangan Pendidikan Islam di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Islam*, 27(1), 56-74.

Zulkifli, M. (2019). Kurikulum dan Relevansi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan*, 28(2), 11-23.